

**DINAMIKA GERAKAN SOSIAL #METOO TERHADAP PELECEHAN  
SEKSUAL DI KOREA SELATAN TAHUN 2017-2021  
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**CHINDIRA AYU ANDINI**

20323324

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**DINAMIKA GERAKAN SOSIAL #METOO TERHADAP PELECEHAN  
SEKSUAL DI KOREA SELATAN TAHUN 2017-2021**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**CHINDIRA AYU ANDINI**

20323324

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### Dinamika Gerakan Sosial #MeToo terhadap Pelecehan Seksual di Korea Selatan Tahun 2017-2021

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

17 Oktober 2024

Mengesahkan  
Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



*Karina*  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.

Tanda Tangan

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

#### **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*02 Oktober 2024*



*Chindira Ayu Andini - 20323324*

#### **DAFTAR ISI**

|                                                                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>SKRIPSI</b>                                                                                                           | i    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b>                                                                                                | iii  |
| <b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>                                                                                    | iv   |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                                                        | v    |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b>                                                                                                     | vii  |
| <b>ABSTRAK</b>                                                                                                           | viii |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>                                                                                                 | 1    |
| <b>1.1 Latar Belakang</b>                                                                                                | 1    |
| <b>1.2 Rumusan Masalah</b>                                                                                               | 7    |
| <b>1.3 Tujuan Penelitian</b>                                                                                             | 7    |
| <b>1.4 Cakupan Penelitian</b>                                                                                            | 8    |
| <b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>                                                                                              | 8    |
| <b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>                                                                                            | 11   |
| <b>1.7 Argumen Sementara</b>                                                                                             | 13   |
| <b>1.8 Metode Penelitian</b>                                                                                             | 13   |
| <i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>                                                                                            | 13   |
| <i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>                                                                                 | 14   |
| <i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>                                                                                     | 14   |
| <i>1.8.4 Proses Penelitian</i>                                                                                           | 14   |
| <b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>                                                                                        | 15   |
| <b>BAB 2 KONTEKS DAN DINAMIKA KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI KOREA SELATAN</b>                                               | 16   |
| <b>2.1. Maraknya Pelecehan Seksual Sebagai Masalah dalam Isu Gender di Korea Selatan</b>                                 | 16   |
| <b>2.2 Strategi Pemerintah Korea Selatan dalam Mengatasi Pelecehan Seksual</b>                                           | 27   |
| <b>BAB 3 ANALISIS SEBERAPA EFEKTIF GERAKAN SOSIAL #METOO DALAM MENANGGULANGI AKSI PELECEHAN SEKSUAL DI KOREA SELATAN</b> | 33   |
| <b>3.1 Strategi Gerakan Sosial #MeToo Korea Selatan</b>                                                                  | 33   |
| <i>3.1.1 Visibility</i>                                                                                                  | 33   |
| <i>3.1.2 Audibility</i>                                                                                                  | 36   |
| <i>3.1.3 Lobbying</i>                                                                                                    | 38   |
| <i>3.1.4 Networking</i>                                                                                                  | 40   |
| <b>3.2 Dampak Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan</b>                                                                 | 42   |
| <i>3.2.1 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat</i>                                                                           | 42   |

|                       |                                                  |    |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----|
| 3.2.2                 | <i>Mobilisasi Opini Publik</i>                   | 43 |
| 3.2.3                 | <i>Dukungan dari Pemerintah dan Tokoh Publik</i> | 44 |
| 3.2.4                 | <i>Tantangan Hukum dan Sosial</i>                | 45 |
| 3.2.5                 | <i>Reaksi Balik Terhadap Feminis</i>             | 46 |
| <b>BAB 4 PENUTUP</b>  |                                                  | 48 |
| 4.1.                  | <b>Kesimpulan</b>                                | 48 |
| 4.2                   | <b>Rekomendasi</b>                               | 49 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> |                                                  | 51 |

## **DAFTAR GRAFIK**

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1. Tingkat Kekerasan Seksual Korea Selatan Tahun 2017-2021 | 11 |
| Grafik 2. Gender Gap Korea Selatan Tahun 2017-2021                | 17 |

## ABSTRAK

Pelecehan seksual marak terjadi di Korea Selatan dengan mayoritas korbannya adalah perempuan dan pelakunya laki-laki. Gerakan Sosial #MeToo telah mendapatkan momentum di Korea Selatan yang bertujuan untuk memberdayakan korban dan meningkatkan kesadaran terhadap pelecehan seksual. Meskipun menghadapi tantangan budaya dan sosial gerakan ini telah menghasilkan peningkatan wacana dan advokasi untuk kesetaraan dan keadilan gender bagi para korban. Gerakan ini juga menyoroti kasus pelecehan seksual di berbagai sektor, termasuk politik, pendidikan dan industri hiburan. Dengan menggunakan *New Social Movements*, efektivitas gerakan dalam memerangi pelecehan seksual melalui berbagai strategi seperti visibilitas, audibilitas, lobi dan jaringan sedang dianalisis. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi evolusi Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan, memahami dampaknya dalam menangani dan mencegah pelecehan seksual di negara tersebut.

**Kata-kata kunci:** Pelecehan seksual, Gerakan Sosial #MeToo, Kesetaraan gender, *New Social Movements*.

## ABSTRACT

Sexual harassment is widespread in South Korea with the majority of victims being women and the perpetrators being men. The #MeToo Social Movement has been gaining momentum in South Korea aimed at empowering victims and raising awareness of sexual harassment. Despite facing cultural and social challenges the movement has resulted in increased discourse and advocacy for gender equality and justice for victims. This movement also highlights cases of sexual harassment in various sectors, including politics, education and the entertainment industry. Using New Social Movements, the movement's effectiveness in combating sexual harassment through various strategies such as visibility, audibility, lobbying and networking is being analyzed. Through qualitative research methods, this research aims to explore the evolution of the #MeToo Social Movement in South Korea, understanding its impact in addressing and preventing sexual harassment in the country.

**Keywords:** Sexual harassment, #MeToo Social Movement, Gender equality, New Social Movements.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain bahkan juga membuat korban trauma. Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual sendiri merupakan suatu tindakan yang bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun non fisik. Perilaku tersebut juga dapat membuat individu atau korbannya merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa terhina bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan mental. Selain itu, tercatat bahwa pelecehan verbal, visual, psikologis dan emosional juga termasuk dalam pelecehan seksual. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas orang yang melaporkan pelecehan seksual di tempat umum adalah mengenakan baju lengan panjang (16%), jilbab (17%) celana atau rok panjang (18%) dibandingkan pakaian minim. Mayoritas korban melaporkan mengalami pelecehan seksual baik pada siang hari (35%) dan malam hari (25%) (BBC, 2019).

Pelecehan seksual juga merupakan salah satu kasus terbesar di Korea Selatan. Berdasarkan temuan penelitian, persentase kejahatan pelecehan seksual meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan di mana 86% korbannya adalah perempuan dan 98% pelakunya adalah laki-laki. Tercatat ada 3,4 kejadian pelecehan seksual setiap jam yang tersedia di database. Ini adalah masalah besar di seluruh dunia yang menyoroti kesenjangan kekuasaan gender di Korea Selatan yang harus diatasi (Hanyang, 2023).

Salah satu tempat di mana pelecehan seksual yang paling banyak terjadi adalah di tempat kerja. Berdasarkan jajak pendapat terhadap perempuan pekerja bahwa 8 dari 10 perempuan Korea Selatan melaporkan mengalami pelecehan dari rekan kerja, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Aspek yang meragukan dari isu ini adalah bahwa 78% perempuan memutuskan untuk menyembunyikan agresi mereka, sementara hanya 22% yang memiliki keberanian untuk mengambil tindakan terhadap pelaku. Konfusianisme adalah fondasi sejarah Korea, dan ia berpendapat bahwa hierarki adalah yang tertinggi. Cara berpikir seperti ini mendorong terciptanya lingkungan yang didominasi laki-laki dan membiarkan perempuan diam ketika mereka mengetahui kebenaran (Hanyang, 2023).

Sebuah sistem hierarki sosial yang dikenal sebagai patriarki menetapkan laki-laki sebagai otoritas utama yang penting bagi berfungsinya masyarakat. Di budaya patriarki ini posisi laki-laki selalu lebih unggul daripada perempuan, entah itu dari segala penjurusan sosial, budaya dan kehidupan (Israpil, 2017).

Budaya patriarki di Korea Selatan tidak lepas dari ajaran Konghucu yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang peradaban Korea. Hal ini menunjukkan betapa patriarki merupakan tema penting dalam konfusianisme, di mana setiap jenis kelamin dianggap memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan keluarga, diklasifikasikan menurut usia nya dan di mana setiap jenis kelamin memiliki peran sosialnya sesuai dengan harapan yang dibuat oleh asosiasi. Meskipun konfusianisme di era modern telah menghilang di Korea Selatan, namun sikap peran gender terus berlanjut di mana laki-laki telah mendapatkan perlakuan dan kesempatan lebih baik dari perempuan (Midha et al., 2018).

Gerakan #MeToo merupakan gerakan sosial yang memiliki tujuan memerangi pelecehan dan kekerasan seksual, yang diluncurkan oleh aktivis sosial Amerika yang bernama Tarana Burke pada tahun 2006. Berkat adanya media sosial, artis Amerika, Alyssa Milano memperkenalkan kembali Gerakan Sosial #MeToo ini pada tahun 2017 melalui media sosial twitter. Setelah itu, Gerakan Sosial #MeToo muncul di media sosial dan mulai melakukan aksi langsung di sejumlah negara di dunia, termasuk Korea Selatan (Gurvinder Gill, 2020).

Tarana Burke menciptakan Gerakan #MeToo dengan tujuan sebagai kemenangan bagi ia sendiri juga untuk membantu orang berhenti menyalahkan diri sendiri atas kekerasan seksual yang dilakukan terhadap mereka dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan (Gurvinder Gill, 2020).

Meskipun muncul di Korea Selatan pada tahun 2017, gerakan sosial ini pertama kali digunakan di Korea Selatan oleh seorang promotor bernama Seo Ji Hyun, yang mana ia melaporkan adanya kasus penyalahgunaan pengalaman seksual yang ia miliki dengan cara yang salah di salah satu wawancara televisi pada tahun 2018 silam. Mantan pejabat Kementerian Kehakiman yang dituduh menjadi pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya kasus tersebut kemudian dipicu dengan adanya ratusan perempuan di Korea Selatan yang bergabung dengan Gerakan Sosial #MeToo ini (Bicker, 2018).

Untuk memahami kelemahan sistem peradilan Korea Selatan terhadap pelecehan perlu dipahami hubungan gender di negara yang sangat patriarki. Dalam hal kekerasan berbasis gender, perempuan pun juga tidak lebih baik. Menurut polisi yang berada di Korea Selatan, pada tahun 2019 perempuan itu sendiri mencapai 98% korban dalam hampir 10.000 kasus kejahatan terhadap

pasangan intim. Hotline Wanita Korea memperkirakan bahwa seorang perempuan terbunuh atau hampir terbunuh setiap 1,8 hari pada tahun itu. Lebih dari setengah korban merupakan perempuan Korea dan Korea juga merupakan negara yang memiliki tingkat pembunuhan perempuan tertinggi di dunia. Hampir 90% perempuan yang disurvei dalam penelitian tahun 2014 oleh Hotline Wanita Korea melaporkan pernah mengalami pelecehan fisik atau emosional di tangan pasangannya. Pelecehan dan diskriminasi di tempat kerja ataupun pemerkosaan yang mana semua itu tidak legal. Namun yang jelas undang-undang ini sendiri tidak cukup untuk mencegah pelaku kekerasan seksual atau berbasis gender (Schieber, 2020).

Gerakan #MeToo ini menerapkan empat strategi utama untuk melawan pelecehan seksual yaitu ada visibilitas, audibilitas, lobi dan jaringan. Gerakan tersebut telah memprotes kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual serta menuntut keadilan bagi para korban. Gerakan tersebut juga mengadvokasi hak-hak perempuan dan mendorong perubahan nyata dalam sistem hukum dan perlindungan bagi para korban. Dalam gerakan sosial, visibilitas sangat penting guna untuk memperluas kesadaran publik. Dalam jurnal yang berjudul “Social Movements Changing,” aksi publik dijelaskan melalui peran media sosial sebagai sarana untuk menyuarakan protes massa yang dapat diakses oleh publik secara luas. Dalam audibilitas Edelman membahas bagaimana gerakan sosial harus memastikan suara mereka didengar oleh pemangku kepentingan yang relevan. Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan menggunakan platform online untuk memperkuat suara para korban pelecehan seksual. Hal ini menciptakan audibilitas melalui kesaksian publik dan kampanye online yang melibatkan banyak orang

untuk menceritakan pengalaman mereka. Dengan cara ini, suara mereka menjadi lebih sulit untuk diabaikan, sesuai dengan konsep Edelman tentang pentingnya suara dalam aksi kolektif. Kemudian lobi merupakan strategi lain yang digunakan Gerakan #MeToo yang mana merupakan strategi untuk mengadakan pertemuan resmi maupun tidak resmi dengan pejabat pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong perubahan. Aktivis dan organisasi menggunakan taktik lobi untuk mendorong pemerintah mengadopsi kebijakan yang lebih ketat terhadap pelanggaran seksual, yang mirip dengan strategi gerakan sosial yang dideskripsikan oleh Edelman. Yang terakhir adalah jaringan di mana terdapat berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan gerakan. Jaringan transnasional sebagaimana dibahas oleh Edelman, ini sangat penting dalam membangun solidaritas. Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan terhubung dengan gerakan global melalui jaringan aktivis dan organisasi yang bekerja sama untuk menyuarakan isu yang sama. Ini memperlihatkan bagaimana jaringan global berperan dalam memperkuat gerakan lokal dan memberikan dukungan yang lebih besar seperti yang dijelaskan oleh Edelman tentang pentingnya jaringan dalam memperkuat gerakan sosial (Edelman 2001).

Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan menyoroti beberapa aspek. Pertama di bidang pembuatan film. Di dunia film, seorang aktor senior bernama Jo Min Ki telah kena tuduhan melakukan pelecehan seksual terhadap setidaknya terdapat 8 perempuan, namun sayangnya aktor tersebut mempercepat hukumannya dengan bunuh diri (BBC, 2018).

Selain itu di bidang politik juga ada seorang politikus yang bernama Ahn Hee Jung, ia merupakan mantan gubernur Provinsi Chungcheong Selatan. Ia

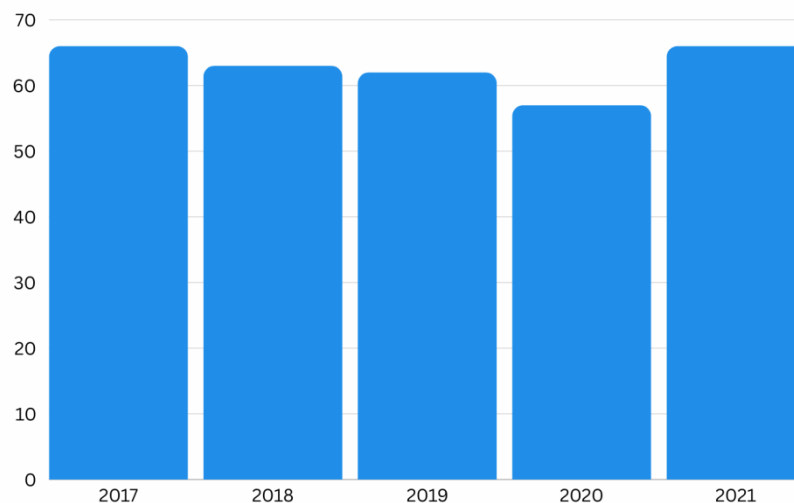
dituduh oleh sekretarisnya sendiri yaitu Kim Ji-eun setidaknya ada sekitar 9 kali antara bulan Juli 2017 dan Februari 2018. Mantan Gubernur Provinsi Chungcheong tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke penjara setelah dibebaskan karena tidak adanya cukup bukti terhadap penuduhnya (Sang-Hun, 2019).

Laporan lain di bidang politik juga datang dari anggota parlemen yang bernama Min Byung Doo, ia mengundurkan dirinya ke Majelis Nasional setelah ada perempuan yang menuduhnya melakukan pelecehan di ruang karaoke. Anggota parlemen Min Byung Doo memang tidak ingat dengan kejadian pelecehan seksual di ruang karaoke tersebut, akan tetapi ia berencana untuk mundur dari posisinya dan mundur dari pemilihan wakil partai pemilihan daerah (Yang, 2018).

Dalam bidang pendidikan pun pada tahun 2018 tagar masalah sosial yang paling banyak di twitter di Korea Selatan adalah tagar #SchoolMeToo. Dengan menggunakan tagar gerakan sosial tersebut mereka memberitahu guru bahwa dia memiliki pelecehan verbal atau fisik yang sudah bertahun-tahun. Salah satu kasusnya adalah beberapa dibujuk ke kamar pribadi untuk menyerang mereka. Bahkan untuk 10 bulan terakhir, siswi di lebih dari 65 sekolah di seluruh negeri telah menggunakan media sosial dan forum audiens lain untuk berbicara tentang pelecehan seksual oleh guru (Kim, 2019).

Berikut merupakan grafik kekerasan atau pelecehan seksual yang ada di Korea Selatan.

**Grafik 1. Tingkat Kekerasan Seksual Korea Selatan Tahun 2017-2021**



Sumber: South Korea Sexual Assault Rate (Yoon, 2023).

<https://www.statista.com/statistics/1232139/south-korea-sexual-assault-rate/>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana perkembangan Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui munculnya Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan.

2. Mengetahui kasus pelecehan seksual apa saja di Korea Selatan dengan menggunakan Gerakan Sosial #MeToo.
3. Mengetahui dampak dari Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan.

#### **1.4 Cakupan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang sudah dituliskan oleh penulis diatas, maka penelitian ini berfokus pada Gerakan Sosial #Metoo di Korea Selatan dari tahun 2017 hingga 2021. Periode ini dipilih karena Gerakan Sosial #MeToo mulai mendapat perhatian luas pada tahun 2017, dipicu oleh adanya pengungkapan Seo Ji-hyun pada tahun 2018 dan mencapai puncaknya selama periode tersebut. Tahun 2021 menjadi batas akhir penelitian karena dampak nyata gerakan terutama perubahan kebijakan terkait pelecehan seksual sudah mulai terlihat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Gerakan Sosial #MeToo mempengaruhi konteks sosial, politik dan budaya. Penelitian ini menggunakan teori *New Social Movements* dari Edelman karena gerakan ini bukan hanya sekedar protes tetapi juga menggerakkan perubahan sosial dan budaya yang mendalam, menantang struktur kekuasaan, menggerakkan opini publik dan juga mendorong perubahan kebijakan di Korea Selatan yang memiliki budaya patriarki yang kuat.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam penulisan proposal ini, penulis mendapatkan beberapa data sekunder atau literatur yang terdapat di daftar pustaka. Literatur tersebut berupa isu mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Korea Selatan.

Dalam jurnal yang berjudul “#MeToo movement takes hold in South Korea” (Bicker, 2018) menjelaskan mengenai Gerakan Sosial #MeToo yang

sudah berhasil masuk dan menguasai Korea Selatan. Ada beberapa tuduhan yang sudah menjatuhkan laki-laki dalam bidang kekuasaan karena gerakan sosial ini. Dan juga perempuan di Korea Selatan sudah berani maju untuk menghadapi budaya patriarki yang telah membuat perempuan bungkam selama ini. Pada tahun 2018 sudah banyak perempuan yang berani mengambil resiko bahwasanya mereka yang berani mengungkapkan kasus pelecehan seksual akan dicemooh dan dicurigai. Bahkan karena keberanian mereka untuk mendobrak penghalang dan berani mengambil resiko, jadi ada ratusan orang yang tampil dengan teriakan #MeToo. Namun gerakan sosial ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, oleh karena itu masih banyak upaya lebih dalam atau perlu mengembangkan dan memperluas tentang Gerakan Sosial #MeToo ini.

Kemudian penulis mengambil jurnal yang berjudul “Sexual Harassment in South Korea” (Hanyang, 2023) yang mana jurnal ini menjelaskan mengenai pelecehan seksual yang sekarang ini menjadi masalah terbesar dan terkini dalam masyarakat Korea Selatan. Persentase kejahatan pelecehan seksual di Korea Selatan tergolong tinggi dan mengkhawatirkan, untuk itu banyak perempuan yang memperjuangkan jenis kelamin mereka dan menuntut agar suaranya didengar. Persentase pelecehan seksual di Korea Selatan mencapai 98% yang mana penyerang adalah laki-laki sedangkan 86% untuk korbannya yaitu perempuan. Kasus setiap harinya mencapai 3 sampai 4 kasus yang dilaporkan dalam setiap jam. Pelecehan seksual yang sering terjadi di negara ini adalah di tempat kerja. Faktanya 8 dari 10 responden mengaku pernah mengalami pelecehan dari rekan kerjanya sendiri. Akan tetapi 78% perempuan merahasiakan serangan mereka dan hanya ada 22% perempuan yang berani mengambil tindakan terhadap penyerang

mereka. Pada jurnal ini masih banyak perempuan yang bungkam dengan kasusnya, oleh karena itu penulis akan memperluas materi.

Untuk jurnal yang ke-3, penulis mengambil judul "South Korea Needs to Contend With Sexual Violence" (Schieber, 2020) ini menjelaskan mengenai Korea Selatan yang perlu melawan atas isu yang sudah pernah terjadi. Karena adanya budaya patriarki yang mendarah daging yang berkontribusi terhadap lemahnya sistem hukum, maka perlu mempelajari lebih lanjut mengenai kesetaraan gender dalam budaya patriarki. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa Indeks Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2020 menempatkan Korea Selatan sebagai peringkat ke 127 dari 153 negara dalam hal partisipasi dan peluang ekonomi. Sebab itu perempuan harus menghadapi realitas ekonomi yang lebih keras dan memiliki kekuatan lebih sedikit daripada laki-laki. Hal tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan terbesar diantara negara lain. Namun karena pada jurnal ini masyarakat Korea Selatan masih bungkam dikarenakan adanya gerakan patriarki, maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai budaya patriarki Korea Selatan yang seharusnya bisa ditaklukkan.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah diulas, banyak peneliti sebelumnya yang telah membahas tentang Gerakan Sosial #MeToo maupun isu pelecehan seksual secara global. Namun, penelitian ini memiliki fokus khusus pada dinamika Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan yang unik karena dipengaruhi oleh konteks budaya patriarki dan dinamika sosial-politik setempat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi bagaimana Gerakan Sosial #MeToo ini berkembang dan

berdampak di Korea Selatan, baik dalam perubahan kebijakan maupun kesadaran sosial.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Pada kerangka pemikiran ini penulis menggunakan teori *New Social Movements*. Teori ini menjelaskan mengenai berbagai perubahan paradigma dalam studi gerakan sosial yang relevan dengan analisis gerakan sosial baru. Contoh nyata dari penerapan *New Social Movements* ini adalah adanya Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan, di mana fokus pada perjuangan atas identitas, budaya dan hak-hak simbolis atau hak-hak perempuan yang sesuai dengan Gerakan Sosial #Metoo yang memperjuangkan kesadaran tentang pelecehan seksual serta ketidaksetaraan gender (Edelman 2001).

Menurut Edelman, teori aksi kolektif ini telah mengalami berbagai perkembangan penting, dari konsep “mass behavior,” kemudian “resource mobilization,” “political process,” hingga akhirnya menuju “New Social Movements” (NSM). NSM terutama berfokus pada identitas dan perubahan simbolis daripada hanya isu-isu ekonomi atau politik. Dalam hal ini, NSM dianggap sangat relevan dalam memahami Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan, di mana bukan hanya menyoroti isu pelecehan seksual sebagai masalah individual tetapi juga sebagai manifestasi ketidakadilan yang terstruktur secara lebih mendalam dalam masyarakat patriarki (Edelman 2001).

Gerakan Sosial #Metoo di Korea Selatan, seperti yang dijelaskan dalam jurnal yang berjudul “Social Movements Changing,” tidak hanya terbatas pada mobilisasi sumber daya untuk memperkuat pengorganisasian melalui media sosial

dan platform digital, akan tetapi juga bertujuan untuk membangun identitas kolektif sebagai korban pelecehan seksual dan ketidakadilan gender. Penggunaan teknologi modern dan media sosial menjadi sarana utama dalam memperkuat suara mereka, meningkatkan kesadaran publik, serta menggalang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menjadikan gerakan tersebut tidak hanya sebagai upaya lokal, tetapi juga bagian dari jaringan yang lebih luas yang melibatkan serikat pekerja, LSM, serta organisasi antar-pemerintah dan pemerintah yang berkolaborasi dalam memperjuangkan perubahan sosial (Edelman 2001).

Teori NSM semakin relevan ketika kita melihat bahwa identitas dan narasi yang dibangun oleh Gerakan Sosial #MeToo memiliki arti lebih penting daripada sekedar tuntutan perubahan kebijakan. Narasi ini berfokus pada bagaimana pengalaman individu korban pelecehan seksual sebenarnya mencerminkan struktur ketidakadilan yang lebih besar dan tertanam norma-norma sosial. Dalam konteks Korea Selatan, gerakan ini dipicu oleh pengungkapan kasus-kasus pelecehan seksual yang melibatkan figur publik, yang kemudian mendorong diskusi lebih luas tentang peran perempuan dalam masyarakat yang masih didominasi oleh patriarki. Masyarakat yang demikian sering kali menormalisasi perilaku predator seksual, sehingga gerakan ini menjadi bentuk perlawanan yang signifikan terhadap dominasi tersebut (Edelman 2001).

Dalam analisis strategi Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan, teori NSM ini sangat relevan karena gerakan ini tidak hanya menuntut pada perubahan hukum akan tetapi juga menuntut akan perubahan sosial serta memperkuat identitas kolektif korban dan memobilisasi dukungan sosial yang lebih luas.

Melalui strategi *visibility*, *audibility*, *lobbying* dan *networking*, Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan membangun identitas kolektif korban, meningkatkan kesadaran publik, serta melobi pemerintah untuk reformasi hukum yang lebih ketat. Gerakan ini terintegrasi dalam jaringan global yang memperkuat gerakan lokal, mencerminkan sifat transnasional dari NSM yang menekankan pentingnya solidaritas antar negara dalam memperjuangkan perubahan sosial (Edelman 2001).

## **1.7 Argumen Sementara**

Pada proposal ini penulis akan membahas mengenai isu pelecehan seksual di Korea Selatan menggunakan *New Social Movements* atau NSM. Selain itu proposal ini juga ditulis untuk mengetahui bagaimana munculnya Gerakan Sosial #MeToo yang ada di Korea Selatan. Isu ini diteliti dimaksudkan karena isu pelecehan seksual tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak kasus terbesar di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan Gerakan Sosial #MeToo karena merupakan gerakan yang memiliki tujuan untuk melawan pelecehan ataupun kekerasan seksual. Penulis mengangkat isu ini karena agar isu pelecehan seksual di Korea Selatan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat di Korea Selatan agar mereka bisa lebih sadar akan pelecehan atau kekerasan seksual yang melonjak dan tergolong tinggi.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan adanya strategi literatur, di mana objek penelitiannya adalah dengan teknik pengumpulan data studi pustaka berupa data-data sekunder. Studi kualitatif ini berfokus pada makna, penalaran, definisi situasi tertentu dan mengkaji lebih banyak masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Gaya penelitian kualitatif ini menghasilkan data berupa data deskriptif berupa gejala-gejala yang dikategorikan yang cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif (Rukin, 2019).

Penulis menggunakan penelitian kualitatif karena tema yang penulis ambil merupakan isu sosial sehingga lebih mudah menggunakan penelitian kualitatif. Data deskriptif juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penjelasan topik penelitian seputar pelecehan seksual.

#### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek penelitian dari riset ini adalah Gerakan Sosial #MeToo Korea Selatan. Sedangkan objek penelitiannya adalah isu pelecehan seksual di Korea Selatan.

#### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Agar diperoleh hasil yang memuaskan, maka perlu didukung dengan tersedianya data sekunder yang cukup dan akurat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

#### *1.8.4 Proses Penelitian*

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data yang sudah diperoleh dalam bentuk data deskriptif. Kemudian setelah mengumpulkan data yang sudah diperoleh tersebut, penulis akan membagi data tersebut menjadi beberapa bagian atau beberapa subtopik. Hal tersebut dilakukan

karena agar mempermudah penulis dalam menganalisis permasalahan agar lebih jelas. Kemudian penulis akan mengembangkan data tersebut menjadi sebuah tulisan yang lebih detail. Setelah itu penulis akan menganalisis data yang sudah diperoleh terkait isu atau kasus penelitian yang diambil.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami sistematika alur penulisan pada pembahasan ini, maka penulis akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai alur penulisan pada masing-masing bab sebagai berikut:

### **a. BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam Bab 1, penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian yang mencakup mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data serta proses penelitian.

### **b. BAB II: KONTEKS DAN DINAMIKA KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI KOREA SELATAN**

Pada Bab 2, penulis akan menjelaskan mengenai kasus pelecehan seksual yang ada di Korea Selatan.

### **c. BAB III: ANALISIS SEBERAPA EFEKTIF GERAKAN SOSIAL #METOO DALAM MENANGGULANGI AKSI PELECEHAN SEKSUAL DI KOREA SELATAN**

Bab 3, penulis akan menjelaskan mengenai seberapa efektif Gerakan Sosial #MeToo ini dalam menanggulangi aksi pelecehan seksual di Korea Selatan.

d. BAB IV: PENUTUP

Bab 4, penulis akan menyimpulkan kasus mengenai pelecehan seksual di Korea Selatan dengan menggunakan Gerakan Sosial #MeToo.

## **BAB 2**

### **KONTEKS DAN DINAMIKA KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI KOREA SELATAN**

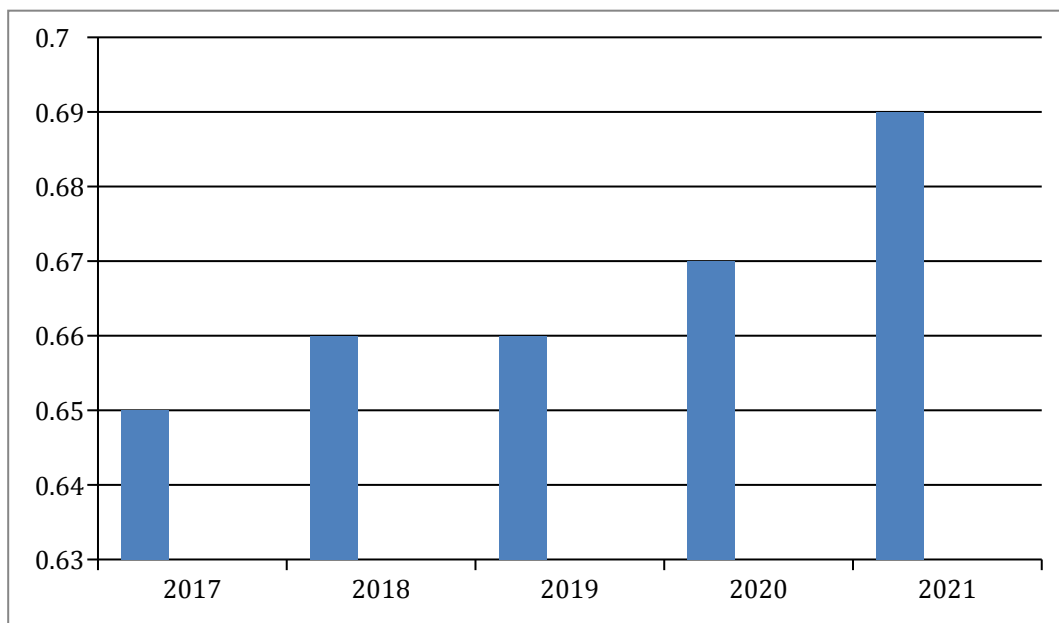
Korea Selatan merupakan sebuah negara yang terletak di Timur Asia dan berada di Semenanjung Korea. Korea sendiri dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Namun, dikarenakan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat hal tersebut tidak sejalan dengan adanya perkembangan yang ada di Korea Selatan. Ketidaksetaraan gender merupakan masalah yang harus diatasi oleh masyarakat dan pemerintah Korea Selatan. Hasilnya, Korea Selatan kini menjadi salah satu negara dengan tingkat pelecehan seksual tertinggi. Di negara ini perempuan masih dipandang sebagai manusia atau makhluk yang lebih rendah. Pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan tersebar luas di Korea Selatan dan disebabkan oleh hal-hal seperti ini. Pelecehan seksual di Korea Selatan mencakup berbagai konteks seperti pelecehan seksual yang terjadi di tempat umum serta yang terjadi dalam lingkup pekerjaan, aktivitas sehari-hari, dan hubungan antarpribadi.

## **2.1. Maraknya Pelecehan Seksual Sebagai Masalah dalam Isu Gender di Korea Selatan**

Ketidaksetaraan gender merupakan isu serius yang merupakan faktor dari pelecehan seksual itu sendiri. Kondisi ketidaksetaraan gender di sini disebabkan oleh adanya budaya patriarki yang masih kuat. Hal tersebut menyebabkan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Meskipun perempuan telah mencapai kemandirian finansial, mereka masih dianggap sebagai kelas kedua di Korea Selatan. Karena keyakinan ini, perempuan masih dipandang lebih rendah dan lemah dibandingkan laki-laki, sehingga memerlukan perhatian, bantuan dan perlindungan dari laki-laki. Karena adanya budaya patriarki yang masih mendominasi dan merasuki masyarakat, maka perempuan harus berada di bawah otoritas laki-laki atau berada dibawah kendali laki-laki. Bahkan bukan sebagai entitas yang setara atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada laki-laki itu sendiri. Pandangan seperti ini yang menjadi penyebab maraknya pelecehan seksual di Korea Selatan (Kardina & Yurisa, 2021). Korea Selatan menempati peringkat ke-102 dalam indeks kesenjangan gender pada tahun 2021 menurut Laporan Kesenjangan Gender Global yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia.

Berikut merupakan grafik gender gap di Korea Selatan dari tahun 2017-2021.

**Grafik 2. Gender Gap Korea Selatan dari Tahun 2017-2021**



Sumber: Gender Gap Index in South Korea from 2016 to 2023 (So, 2023).

<https://www.statista.com/statistics/1378362/south-korea-gender-gap-index/>

Kesenjangan gender pada umumnya dipahami sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan di sejumlah bidang (Widya, 2021). Indeks kesetaraan gender yang sudah tertera mencerminkan keberhasilan Presiden Moon Jae-In dalam menanggapi isu kesetaraan gender selama masa kepemimpinannya dari tahun 2017 hingga 2022. Ia menggantikan Park Geun-hye sebagai Presiden Korea

Selatan. Dengan sikap politik liberal, Moon Jae-In tampil sebagai pemenang dalam pemilu menjadi Presiden Korea Selatan ke-12. Ia juga menunjukkan kepemimpinan yang penuh visi dan strategis (Reditya, 2021). Moon Jae-In mengimplementasikan sejumlah kebijakan sambil menghadapi tantangan untuk memulihkan citra integritas negara di panggung Internasional. Bahkan, Moon Jae-In secara pribadi menyatakan bahwa dirinya merupakan seorang presiden yang mendukung kesetaraan gender. Selain itu Presiden ke-12 Korea Selatan ini juga menyuarakan komitmennya terhadap pembebasan kaum perempuan di Korea Selatan (Maharani, 2022).

Sesuai dengan pernyataan Presiden Moon Jae-In, pada peringatan Hari Perempuan Internasional ke-114, Presiden Korea Selatan mendukung deklarasi mengenai kesetaraan gender. Presiden Moon Jae-In dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa kemajuan Korea Selatan menuju kesetaraan gender masih tertinggal dibandingkan negara lain. Pemerintah Korea Selatan harus berusaha untuk memperbaiki dan mengembangkannya. Selain itu ia juga memberikan dukungan kepada pekerja perempuan yang berani bersuara dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana tantangan ini terus berlanjut.

Presiden Moon Jae-In menekankan pada Hari Perempuan Internasional bahwa mencapai kesetaraan gender sangat penting untuk membangun masa depan yang berkelanjutan bagi laki-laki dan perempuan. Di akun media sosialnya, Presiden ke-12 Korea Selatan ini juga mengakui bahwasanya diskriminasi dan struktur budaya merupakan hal yang menghambat kesetaraan gender yang masih ada di berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah, sebagai respon terhadap permasalahan yang telah terjadi melakukan kemajuan signifikan, seperti halnya

merevisi undang-undang wanita yang mengganggu karir atau diskriminasi yang tidak terlihat (*glass ceiling*) dan pemberlakuan undang-undang hukuman menguntit. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat sistem tanggap terhadap kekerasan gender terutama dalam ranah kejahatan seks digital (KBS, 2022).

Faktor pelecehan seksual lainnya adalah adanya stigma dan tekanan sosial ketika korban pelecehan seksual mencoba melaporkan kasus terhadap pelaku. Perilaku dan tindakan petugas selama penyelidikan bersifat merendahkan dan memalukan, sering kali dengan penghinaan dan meremehkan korban. Hal ini mendorong dan mendukung sistem kekerasan dan reviktimisasi yang membuat korban enggan melaporkan kasus. Korban jadi merasa malu atau takut melapor karena adanya stigma sosial terkait isu pelecehan seksual. Tekanan untuk tetap diam atau menyembunyikan kasus pelecehan dapat mengakibatkan rendahnya angka pelaporan, yang pada gilirannya menyuburkan pelecehan seksual berbasis gender. Perempuan seringkali dipandang sebagai objek yang harus disalahkan atas tindakan penyerangan, pelecehan atau pemerkosaan. Mereka dipaksa untuk bertanggung jawab atas tindakan pelaku. Untuk menjelaskan keberadaan kekerasan ini, sebuah budaya di mana perempuan terus menerus dipermalukan dan dibungkam secara strategis terakar dalam fondasi masyarakat. Meskipun kebijakan pemerintah berfokus pada dampak kejahatan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil menangani akar permasalahannya secara menyeluruh (Brito, 2020).

Korea Selatan mengalami penurunan signifikan dalam jumlah pekerja imigran akibat adanya laporan terkait insiden-insiden kasus kekerasan seperti pelecehan seksual, penganiayaan, dan keterlambatan pembayaran upah di

kalangan pekerja asing karena mereka menuduh bahwa majikannya telah mengeksploitasi status mereka. Pada Maret 2021 terdapat laporan akan dugaan pelecehan seksual dari seorang pekerja asal Kamboja yang menjadi korban serangan seksual oleh majikannya. Laporan tersebut diajukan oleh kelompok sipil yang berfokus pada perlindungan hak-hak pekerja imigran dan menuding bahwa pemilik pertanian di Chungcheong Selatan secara paksa masuk ke tempat tinggal pekerja perempuan dan pelecehan seksual terhadapnya beberapa kali pada tahun 2020. Korban menyatakan bahwa pemilik pertanian Chungcheong memaksa untuk melakukan aborsi ketika dia hamil dan mengancam akan melaporkannya sebagai imigran ilegal jika korban mencoba untuk melarikan diri. Kasus ini merupakan salah satu dari banyaknya pelecehan seksual yang telah dilaporkan karena korban menuduh majikannya mengambil keuntungan dari status rentannya (Yuri, 2021).

Selain kasus dari pertanian Chungcheong ada juga kasus dari pengelola peternakan Hongcheon, Gangwon. Ia dijatuhi hukuman penjara pada November 2019 karena telah melakukan upaya pelecehan seksual terhadap seorang pekerja asing di lahan pertaniannya. Laki-laki berusia 50 tahun tersebut membawa pekerja perempuan ke sebuah kabin dan berusaha melakukan pelecehan seksual sebelum akhirnya dihentikan oleh seorang rekan kerjanya. Pada tahun yang sama ada pemilik lahan pertanian Gangwon juga diberi hukuman karena adanya percobaan pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan di area pertaniannya. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus yang terbongkar, seruan untuk meningkatkan kondisi kerja dan melindungi pekerja migran yang berada dalam situasi sulit semakin berkembang (Ji-hye, 2021).

Di Korea Selatan, terdapat kasus pelecehan seksual yang melibatkan selebriti ternama selain petani dan pemilik peternakan. Di Universitas Cheongju, tempat ia mengajar, ia dituduh terlibat dalam banyak insiden pelecehan seksual dengan diduga mencumbu setidaknya 8 mahasiswi. Karena dituduh terlibat dalam kasus pelecehan seksual laki-laki bernama Jo Min-ki ditemukan tewas dirumahnya yakni di Seoul. Jabatan guru besar laki-laki berusia 52 tahun ini dibatalkan atau dicabut karena tuduhan pelecehan seksual. Jo Min-ki biasanya terlibat dalam film serial televisi meskipun juga berperan dalam beberapa film layar lebar. Namun ia kehilangan posisinya di serial televisi, *Children of the Small Good* setelah tuduhan pelecehan seksual muncul. Meskipun awalnya membantah tuduhan tersebut, pada tanggal 27 Februari ia meminta maaf kepada para perempuan yang telah mengajukan pengaduan terhadapnya (Bicker, 2018).

Dalam ranah politik, seorang Gubernur Provinsi Chungcheong di Korea Selatan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya setelah tersandung kasus pelecehan seksual dengan dugaan skandal pemerkosaan. Laki-laki yang sering disapa Ahn Hee Jung diduga melakukan pemerkosaan terhadap mantan sekretarisnya, Kim Ji Eun. Korban mengungkapkan tuduhan tersebut melalui sebuah program berita di stasiun televisi lokal, JTBC. Selain mengungkapkannya di televisi, Kim Ji Eun juga berencana untuk mengajukan gugatan hukum terhadap Ahn. Tuduhan tersebut menyatakan bahwa laki-laki berusia 54 tahun itu telah diduga melakukan pemerkosaan terhadapnya sebanyak 4 kali selama 8 bulan terakhir dari Juni 2017 hingga Februari. Kim memutuskan untuk mengungkap perlakuan tidak senonoh mantan atasannya tersebut karena Kim merasa terus mendapat pelecehan seksual bahkan di masa kerja terakhirnya. Kim Ji Eun bahkan

juga mengklaim bahwa ada beberapa perempuan lain di bekas kantornya yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Menanggapi kasus ini, partai yang menaungi Ahn Hee Jung meminta maaf kepada publik atas tuduhan yang telah menjerat anggotanya dan juga mengadakan rapat untuk merespon pengakuan dari mantan sekretaris Ahn Ji Eun tersebut. Beberapa jam setelah kejadian tersebut terjadi Ahn Ji Eun secara cepat langsung mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Provinsi dan menyatakan niatnya untuk pensiun dari seluruh jabatan publik dan aktivitas politiknya (Suastha, 2018).

Salah satu contoh kasus terbesar pelecehan seksual yang ada di Korea Selatan biasa disebut dengan skandal Nth Room. Kasus Nth Room di Korea Selatan ini mengidentifikasikan bahwa hingga saat ini masyarakat Korea Selatan masih kesulitan untuk bisa menghilangkan penindasan terhadap perempuan dan menangani ketiakteimbangan gender (Inhwa Jeong, 2021). Kasus ini merupakan kasus eksploitasi perempuan dengan penyalahgunaan teknologi. Ada sekitar 74 korban eksploitasi ini termasuk dengan adanya anak perempuan dibawah umur. Korban dipaksa untuk membuat konten tidak senonoh yang nantinya akan diunggah ke media sosial berupa Telegram. Di media sosial Telegram tersebut, setidaknya ada 260.000 pengguna yang dapat mengakses dan bahkan mau membayar dengan mata uang kripto (Souza, 2020).

Para pelaku yang memanfaatkan informasi pribadi kadangkala diperoleh secara ilegal dari kantor pemerintah setempat. Hal tersebut digunakan untuk memaksa banyak perempuan serta anak-anak dibawah umur melakukan tindakan seksual eksplisit didepan kamera yang kemudian akan disaksikan oleh ribuan pengguna yang sudah membayar. Perempuan dibawah umur direndahkan, dipaksa

untuk bersikap seperti anjing dengan menggonggong mirip dengan anjing atau bahkan berbaring telanjang di toilet umum laki-laki. Kejadian pelecehan yang sadis ini telah mengejutkan seluruh negara. Tidak kurang mengejutkannya bahwa para pelaku terdiri dari remaja berusia belasan hingga awal 20-an (You-bin, 2020).

Peristiwa ini menyoroti seberapa jauh teknologi masa kini dapat digunakan untuk mengeksploitasi manusia dalam bentuk perbudakan modern yang baru. Seperti yang sudah diungkapkan oleh salah satu korban bahwa berbagai informasi pribadi dan identitas mudah diunggah di platform media sosial sebagai bagian dari rutinitas harian dan informasi tersebut dapat untuk menjebak korban. Perbudakan modern ini merujuk pada kondisi di mana seseorang memanfaatkan atau menggunakan paksaan, penipuan, atau ancaman untuk mengeksploitasi korban dan merampas kebebasan mereka. Ini sudah merupakan kejahatan global karena sudah termasuk dalam perdagangan manusia, eksploitasi anak maupun kerja paksa (Souza, 2020).

Tujuan dari film “Cyber Hell: Exposing an Internet Horror” adalah untuk memberikan ringkasan atau gambaran umum kasus Nth Room. Nth Room ini mencakup 8 grup Telegram yang dibentuk oleh pelaku dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi terhadap korban. Korban-korban tersebut dipaksa untuk membuat konten pornografi yang kemudian akan disebarluaskan di grup melalui media Telegram yang mana grup tersebut diberi nama ‘Gotham Room’. Cho ju-bin merupakan terdakwa dalam pimpinan jaringan pelecehan seksual online Nth Room tersebut. Terdakwa dinyatakan mendapatkan hukuman 40 tahun penjara karena ia telah melakukan eksploitasi berupa memeras perempuan muda untuk

membuat video pornografi yang kemudian video tersebut dijual melalui grup media Telegram. Ada sebanyak 10.000 orang yang mengakses pesan terenkripsi yang telah dikelola oleh Cho ju-bin dengan membayar agar bisa mendapatkan akses. Bahkan beberapa diantaranya mau membayar hingga US\$1.200 atau sekitar 17 juta rupiah. Korban perempuan sebanyak 74 orang tersebut 16 diantaranya merupakan perempuan dibawah umur. Cho Ju-bin dinyatakan bersalah oleh pengadilan Korea karena telah mengoperasikan jaringan kriminal pelecehan seksual yang membuat dan memasarkan film pelecehan seksual dengan tujuan mendapatkan keuntungan, serta melanggar peraturan perlindungan anak. (BBC, Pengadilan Korea Selatan hukum pimpinan jaringan pelecehan seks online terbesar, bagaimana modusnya? 2020)

Pelaku pelecehan seksual yang bernama Cho ju-bin ini terpublikasi karena badan kepolisian mengambil langkah dengan tanda tangan petisi dan telah ditandatangani oleh 5 juta orang. Kasus ini sampai disoroti oleh para advokasi perlindungan perempuan karena pengadilan di Korea Selatan seringkali dikritik akibat dianggap terlalu ringan memberikan tindakan terhadap pelaku kejahatan seks di dunia maya. Tindakan yang diambil badan kepolisian berjumlah lebih dari 80.000 petisi dan telah diajukan ke pengadilan untuk membujuk para hakim untuk memberikan hukuman yang sebanding kepada kelompok Cho ju-bin. Hukuman 40 tahun penjara yang telah diberikan kepada Cho ju-bin sebenarnya lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa karena sebelum ditetapkan 40 tahun penjara, Cho ji-bin sebelumnya ditetapkan menjalani hukuman seumur hidup. Sementara orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ditetapkan hukuman mulai dari 7 hingga 15 tahun penjara (BBC, 2020).

Skandal Nth Room terus menjadi permasalahan yang meluas dan sulit untuk diselesaikan karena melibatkan pemanfaatan teknologi digital dan media sosial dalam penyebaran konten pelecehan seksual. Dengan memanfaatkan anonimitas online, pelaku dapat beroperasi tanpa terdeteksi, sehingga membuat proses penuntutan dan identifikasi pelaku menjadi semakin sulit. Terlebih lagi dalam konteks ini, penggunaan transaksi dengan menggunakan teknologi cryptocurrency menjadi faktor yang mempersulit pelacakan keuangan. Hal ini disebabkan karena pelaku memiliki kemampuan untuk menyembunyikan riwayat keuangan mereka. Nth Room juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual yang terorganisir dan rumit karena mengingat adanya pelaku yang bekerja bersama-sama dan berkolaborasi. Hal tersebut menciptakan tantangan dalam upaya menanggulangi kasus pelecehan seksual ini dengan efisien (Ju-a, 2020).

Selain itu juga ada Kasus Burning Sun. Kontroversi besar terkait kasus ini mengguncang Korea Selatan pada awal tahun 2019. Kasus ini bermula dari tuduhan bahwa seorang laki-laki bernama Kim Sang-kyo yang berusaha membantu seorang perempuan yang tampaknya berada dalam bahaya di dalam klub malam Burning Sun di Seoul, namun ternyata diserang oleh petugas keamanan. Penyelidikan awal terhadap insiden ini mengungkapkan adanya jaringan luas aktivitas ilegal di klub tersebut, termasuk penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, perdagangan manusia dan suap. Salah satu tokoh terkenal yang terlibat dalam skandal ini adalah anggota boyband Big Bang yang memiliki ketenaran, kekayaan dan jutaan penggemar perempuan yaitu Seungri, yang diduga terlibat dalam manajemen klub dan menyediakan layanan prostitusi bagi investor asing. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa beberapa

selebriti Korea termasuk Seungri, Jung Joon-young dan Choi Jong-hoon, adalah bagian dari grup chat di aplikasi KakaoTalk tempat mereka bertukar film seks terlarang dan membicarakan tentang pelecehan seksual. Proses hukum yang panjang dan kompleks dengan berbagai tuduhan kriminal dan keterlibatan banyak pihak telah memperlambat penyelesaian kasus ini. Selain itu, tekanan publik dan liputan media yang intens turut menambah kompleksitas proses hukum. Sementara skandal ini juga memicu diskusi luas tentang penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum dalam industri hiburan Korea Selatan. Hingga saat ini beberapa tokoh yang terlibat masih menjalani proses pengadilan atau menunggu hasil banding dan upaya untuk mereformasi industri hiburan serta mengatasi masalah sistemik yang terungkap dalam skandal ini terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kasus Burning Sun masih dirasakan dan proses penyelesaiannya belum sepenuhnya selesai (BBC, 2024).

## **2.2 Strategi Pemerintah Korea Selatan dalam Mengatasi Pelecehan Seksual**

Perdana Menteri Korea Selatan, Chung Sye-kyun, memimpin pertemuan yang digunakan pemerintah negara tersebut untuk mengambil tindakan terhadap kejahatan seksual. Menyelidiki permasalahan yang ada dan mengembangkan rencana untuk mengakhiri pelanggaran seksual digital adalah tujuan dari pertemuan ini. Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah Korea Selatan bermaksud untuk memperkuat sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran seksual terhadap anak dibawah umur. Selain itu pemerintah Korea Selatan telah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi generasi muda dari pelanggaran seksual. Pembatasan usia bagi korban kekerasan seksual sebelumnya dibatasi pada

mereka yang berusia di bawah 13 tahun, namun kini telah ditingkatkan menjadi 16 tahun. Pemerksaan di kalangan remaja dianggap sebagai kejahatan serius, dan bahkan mereka yang merencanakan kejahatan tersebut tetapi memilih untuk tidak melakukannya dapat mengakibatkan risiko hukuman yang berat. (KBS, 2020).

Pada tahun 2001, Kementerian Gender dan Keluarga didirikan di Korea Selatan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang merajalela. Kementerian ini bertugas menerapkan kebijakan nasional, mengurangi kekerasan atau pelecehan seksual dan mendorong partisipasi politik perempuan (Penda, 2023). Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga (MOGEF) Korea Selatan atau akrab disapa Chung Hyun-bak, berkomitmen untuk mengeluarkan aturan yang lebih ketat terkait kasus pelecehan seksual di Korea Selatan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif bagi pelecehan seksual terhadap perempuan. Selain berkomitmen untuk mengeluarkan peraturan yang lebih ketat, pemerintah juga menyatakan sedang mempertimbangkan peningkatan sanksi bagi individu yang lengah dalam menangani kasus pelecehan seksual. MOGEF ini bertujuan untuk memprioritaskan upaya pemberantasan pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi dalam struktur kekuasaan hierarki (Arungbudoyo, 2018).

Meskipun ada undang-undang yang mengatur isu pelecehan seksual ini, hingga saat ini pemerintah Korea Selatan belum berhasil mengatasi pelecehan seksual terutama yang di tempat kerja. Hal ini disebabkan oleh pelecehan seksual yang sudah menjadi fenomena umum bahkan terakar kuat dalam budaya yang mempertahankan perbedaan gender. Untuk menghadapi meningkatnya kasus pelecehan seksual, Presiden Moon Jae In dan pemerintah menyatakan niat mereka untuk mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi masalah ini (Young-

hee, 2017). Sejak masa kampanye hingga masa pemerintahannya, Moon Jae in sudah menggambarkan dirinya sebagai presiden feminis. Selama kampanye ia juga telah berjanji untuk menciptakan lingkungan Korea Selatan yang aman dan merata bagi perempuan (Herald, 2017).

Presiden Moon Jae-in telah mengambil serangkaian langkah untuk menangani masalah pelecehan seksual dengan tindakan pertama yang melibatkan penguatan undang-undang terkait masalah tersebut dan meningkatkan hukuman bagi pelaku. Pemerintah Korea Selatan melalui Majelis Nasional, melakukan revisi terhadap undang-undang terkait kejahatan seksual dengan peneguhan hukuman yang lebih keras. Undang-undang yang direvisi tersebut mencakup peningkatan hukuman untuk kejahatan seksual, menyembunyian hasil kejahatan, serta perlindungan bagi anak-anak dan remaja. Dalam revisi undang-undang tentang hukuman kekerasan seksual, diperkenalkan pasal baru yang mengatur bahwa siapapun yang memiliki, membeli, menyimpan atau menonton rekaman seksual ilegal diancam dikenai hukuman pidana maksimal 3 tahun penjara dan denda maksimal 30 juta won. Selain itu, menyebarkan video tidak senonoh yang direkam sendiri juga akan dikenakan sanksi. Bahkan mereka yang merencanakan perampokan dan pemerkosaan meski tidak terealisasi bisa divonis hukuman 3 tahun penjara. Undang-undang pidana yang direvisi juga memperluas cakupan hukuman atas tindakan kekerasan seksual, baik dengan maupun tanpa persetujuan. Yang sebelumnya hanya berlaku untuk korban dibawah usia 13 tahun, kini berlaku hingga usia 16 tahun. Sementara itu, revisi undang-undang perlindungan anak dan remaja memperkuat perlindungan bagi mereka yang terlibat kasus

prostitusi dan memutuskan untuk mempublikasikan data pribadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dan remaja (KBS, 2020).

Amnesty International menyoroti pentingnya Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol untuk mengubah perlakuan terhadap perempuan di Negara Korea Selatan. Yoon sering kali mengeluarkan pernyataan yang bernada anti-feminis dan meremehkan masalah diskriminasi gender yang sistemik. Korea Selatan dikenal memiliki kesenjangan upah gender tertinggi diantara negara-negara OECD dan tingkat partisipasi politik perempuan rendah. Kasus Nth Room mengungkapkan tingkat eksploitasi seksual digital yang sangat serius, menunjukkan adanya misogini yang mendalam di masyarakat. Amnesty International mendesak Yoon untuk mengakui diskriminasi gender dan mengambil langkah nyata untuk memajukan kesetaraan gender (Jang, 2022).

Korea Selatan mengalami peningkatan ketidaksetaraan gender yang signifikan dengan ditandai meningkatnya angka kejahatan fisik dan digital terhadap perempuan dan feminisme atas berbagai masalah sosial. Meskipun ada kemajuan dalam hal hak reproduksi perempuan, perlindungan hukum masih kurang memadai. Situasi ini diperparah oleh kemenangan tipis kandidat konservatif Yoon Suk-yeol dalam pemilihan presiden 2022 yang mendapat dukungan dari kaum muda yang merasa ada diskriminasi terhadap laki-laki. Kejahatan seks digital marak terjadi dengan banyaknya kasus perekaman ilegal menggunakan kamera tersembunyi di tempat-tempat umum. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap situasi ini termasuk dominasi laki-laki dalam sistem peradilan dan kepolisian, serta munculnya gerakan *Alt Right* yang menentang perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Politisi konservatif memanfaatkan

sentimen anti-perempuan untuk meraih dukungan publik. Survei menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan muda mengenai feminisme dengan mayoritas laki-laki menolak dan mayoritas perempuan mendukungnya. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini ada beberapa kemajuan dalam hak reproduksi perempuan. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengakui hak perempuan untuk melakukan aborsi pada tahun 2019 dan menghapuskan hukuman bagi aborsi pada akhir tahun 2021. Namun masih ada kekosongan hukum dalam implementasi keputusan ini, karena Majelis Nasional belum merumuskan undang-undang yang menetapkan pedoman aborsi medis yang sah. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan perbaikan mendesak dalam undang-undang untuk melindungi hak-hak perempuan dan menghukum pelaku kejahatan. Undang-undang anti penguntitan perlu direvisi untuk menutup celah hukum yang saat ini melindungi pelaku daripada korban. Tanpa perbaikan-perbaikan ini, ancaman misoginis terhadap perempuan dan perlindungan hukum yang tidak memadai akan terus menjadi kelemahan mendasar dalam demokrasi Korea Selatan (Moon, 2022).

Di Korea Selatan, kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan fisik yang menyebabkan kerusakan fisik dan mental melalui tindakan seksual. Negara ini mengatur dan menghukum kejahatan seksual melalui beberapa undang-undang yang pertama undang-undang pidana yang mana mengatur mengenai kejahatan seksual secara umum. Kedua, undang-undang khusus tentang pembedaan terhadap kejahatan kekerasan seksual yang akan memberikan sanksi khusus terhadap kejahatan seksual. Yang ketiga undang-undang jaringan informasi dan komunikasi yang mengatur tentang pelanggaran seksual online. Dan yang terakhir

adalah undang-undang tentang perlindungan anak dan remaja dari seks yang melindungi anak dan remaja dari eksploitasi seksual (Kristen, 2023).

Peradilan Korea Selatan mengenai kekerasan seksual masih menghadapi banyak tantangan dan kritik karena dianggap diskriminatif. Korban kekerasan seksual sering dihadapkan pada standard pembuktian yang tinggi di Korea Selatan. Korban mungkin diminta untuk menunjukkan bukti fisik atau saksi mata yang dalam banyak kasus kekerasan seksual sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diperoleh. Ini dapat menyebabkan banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak di proses di pengadilan. Selain itu, sistem peradilan Korea Selatan masih sering mempertanyakan perilaku korban, seperti pakaian mereka, konsumsi alkohol atau hubungan mereka dengan pelaku. Beberapa kasus kekerasan seksual yang berhasil dibawa ke pengadilan berakhir dengan hukuman yang dianggap terlalu ringan oleh aktivis dan masyarakat umum. Ini dapat mencakup hukuman percobaan atau hukuman penjara singkat untuk kejahatan serius yang dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem peradilan tidak menganggap serius kejahatan kekerasan seksual (Kristen, 2023).

## BAB 3

### ANALISIS SEBERAPA EFEKTIF GERAKAN SOSIAL #METOO DALAM MENANGGULANGI AKSI PELECEHAN SEKSUAL DI KOREA SELATAN

#### 3.1 Strategi Gerakan Sosial #MeToo Korea Selatan

Dalam kaitannya dengan teori *New Social Movements* dari Edelman, Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan mencontohkan bagaimana empat strategi berperan penting dalam memperkuat dinamika gerakan untuk mencapai tujuannya. Di mana empat strategi utama ini mencerminkan betapa pentingnya perubahan identitas simbolis dan transformasi budaya dalam memperjuangkan melawan ketidakadilan seksual. Strategi *visibility* memungkinkan bagaimana gerakan ini memperluas kesadaran publik melalui aksi massa dan kampanye media sosial yang tidak hanya menampilkan pengalaman korban, akan tetapi juga menantang norma-norma patriarki yang mendasari pelecehan seksual. Melalui *audibility* suara korban menjadi sulit untuk diabaikan, sesuai dengan konsep NSM yang menekankan pada pentingnya narasi individu dalam menciptakan perubahan sosial. Strategi *lobbying* digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan dengan cara mempengaruhi pengambilan keputusan, sementara *networking* memperkuat gerakan ini melalui jaringan transnasional yang memungkinkan kerja sama antara berbagai organisasi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Empat strategi ini dijabarkan dalam paragraf di bawah ini.

##### 3.1.1 *Visibility*

Pertama visibilitas, dalam konteks NSM visibilitas menjadi strategi atau kunci dalam memperluas jangkauan pesan dan mobilisasi massa. Gerakan Sosial #MeToo menggunakan visibilitas untuk menciptakan kesadaran kolektif melalui demonstrasi publik, aksi massa dan penggunaan media sosial. Visibilitas ini tidak hanya tentang kehadiran fisik akan tetapi juga tentang bagaimana gerakan tersebut menampilkan narasi korban untuk menantang struktur patriarki yang berkuasa. NSM menekankan bagaimana pentingnya membangun identitas kolektif melalui aksi-aksi publik yang terlihat, sehingga gerakan dapat menciptakan ruang bagi korban untuk berbicara secara terbuka tentang pelecehan seksual. Dengan demikian, visibilitas ini tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi akan tetapi juga sebagai strategi simbolis untuk menunjukkan resistensi terhadap dominasi gender. Misalnya pada tanggal 5 Februari 2018, sekelompok orang yang terdiri dari anggota 15 kelompok sipil berkumpul di depan kantor kejaksaan. Tujuan mereka adalah untuk memprotes kasus-kasus kekerasan seksual yang masih belum terselesaikan di Korea Selatan. Selain itu mereka juga memprotes kasus pelecehan seksual yang dialami oleh Ji-hyun yang menjadi salah satu katalis utama Gerakan #MeToo di negara tersebut. Demonstrasi ini bukan hanya sekedar unjuk rasa, akan tetapi juga merupakan upaya untuk menarik perhatian publik dan pemerintah terhadap masalah serius yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual. Dengan melakukan aksi secara terbuka di tempat strategis mereka berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mobilisasi dukungan dan mendorong perubahan nyata dalam sistem hukum dan perlindungan bagi korban (Soo-hyun, 2018). Ratusan perempuan melakukan protes di Gwanghwamun di Seoul pada 8 Maret, bertepatan pada Hari Perempuan Internasional. Mereka membawa spanduk

dan plakat bertuliskan “#MeToo”. Aksi ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih besar untuk menuntut keadilan bagi korban pelecehan seksual dan untuk mengadvokasi hak-hak perempuan di Korea Selatan. Dengan turun ke jalan dan menunjukkan solidaritas mereka para demonstran berharap dapat menarik perhatian publik dan pemerintah terhadap isu-isu gender yang mendesak. Pesan yang mereka bawa mencerminkan semangat Gerakan #MeToo dan tekad untuk memperjuangkan perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil (Amsden, 2018). Pada tanggal 4 Agustus sekitar 70.000 perempuan berkumpul di pusat kota Seoul untuk melakukan demonstrasi terbesar dalam sejarah Korea Selatan yang berlangsung selama 4 tahun berturut-turut untuk mengecam kejahatan molka atau kamera tersembunyi. Para demonstran menutupi wajah mereka karena khawatir akan menjadi target serangan seksual dan objektifikasi. Selain itu mereka menyerukan hukuman yang lebih berat bagi individu yang terlibat dalam pembuatan, penyebaran dan penontonan video yang menjijikkan tersebut (Se Eun Gong, 2018).

Menurut Baek Mi-soon, dari Federasi Organisasi Perempuan Korea, “Gerakan MeToo muncul ketika tidak hanya aktivis perempuan tetapi juga warga perempuan berkumpul menjadi satu.” Di Korea Selatan, Gerakan #MeToo berkembang pesat dan mengubah kebijakan pemerintah dengan cara yang bermanfaat dan mendorong terbentuknya komite-komite di berbagai kementerian untuk menangani pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Namun di balik pencapaian ini, muncul kritik terhadap anggota parlemen yang dianggap kurang serius dalam meloloskan undang-undang terkait #MeToo. Organisasi-organisasi perempuan telah mengkritik Majelis Nasional atas kegagalan mereka dalam

meloloskan RUU #MeToo, meskipun banyak rancangan undang-undang telah diajukan. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai implementasi kebijakan #MeToo di masa depan, terutama terkait masalah anggaran dan koordinasi antar kementerian. Situasi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara dampak sosial yang signifikan dari Gerakan #MeToo dan tantangan dalam mengubahnya menjadi perubahan hukum dan kebijakan yang nyata di Korea. Oleh karena itu, Federasi Organisasi Wanita Korea dan Pusat Respons Kekerasan Seksual Siber Korea di akhir sidang regular Majelis Nasional, dilakukan konferensi pers pada tanggal 29 November dan mengkritik Majelis Nasional karena tidak meloloskan tagihan #MeToo (Yun-jeong, 2018).

### *3.1.2 Audibility*

Strategi audibilitas dalam Gerakan Sosial #MeToo yang merupakan kemampuan untuk menyebarkan pesan melalui media berbasis suara seperti radio dan televisi. Di Korea Selatan, Gerakan #MeToo berhasil menggunakan media ini secara efektif untuk menyampaikan pesannya. Hal ini sangat terkait dengan teori NSM yang menekankan peran narasi individu dalam menciptakan pergeseran makna sosial. Gerakan ini menggunakan audibilitas untuk memastikan bahwa suara korban tidak hanya didengar oleh masyarakat akan tetapi juga oleh pengambil kebijakan dan pihak-pihak berwenang. Teori NSM dalam Edelman menunjukkan bahwa gerakan sosial ini menciptakan ruang di mana identitas korban dan pengalaman mereka dapat diakui secara publik, yang pada gilirannya membantu memperkuat solidaritas diantara korban serta mendorong perubahan persepsi masyarakat tentang pelecehan seksual. Salah satu contoh awal dari penggunaan media ini adalah ketika Seo Ji Hyeon yang mana merupakan seorang

jaksa membuat pernyataan yang menginspirasi banyak orang di acara televisi lokal. Penampilannya di televisi memberikan dorongan signifikan bagi gerakan tersebut karena telah meningkatkan kesadaran publik dan memotivasi korban lain untuk berbicara. Media suara menjadi alat penting dalam menyebarkan cerita dan pesan Gerakan #MeToo, karena memungkinkan pesan tersebut menjangkau audiens yang lebih luas dan menggalang dukungan yang lebih besar dari masyarakat. Dengan menggunakan radio dan televisi, gerakan ini mampu mengatasi batasan komunikasi dan menginspirasi tindakan nyata dalam menanggulangi pelecehan seksual (JTBC, 2018).

Reporter Oh Hyuk Jin salah satu orang yang dikenal karena meliput skandal Burning Sun telah menjadi perhatian sekitar karena khawatir akan keselamatannya. Kekhawatiran ini muncul setelah ia menutup akun Instagramnya, meskipun sebelumnya ia mengklaim akan mengungkap berita besar terkait skandal tersebut. Situasi ini semakin mencurigakan karena Oh Hyuk Jin sebelumnya menyatakan bahwa ia tidak akan dijebak atas tuduhan bunuh diri atau dibunuh. Selain itu ada insiden kebakaran di rumah wartawan lain yang juga menyelidiki kasus ini. Meskipun akun Instagramnya kini sudah dibuka kembali dalam mode privat, Oh Hyuk Jin belum memberikan klarifikasi apapun sehingga menimbulkan spekulasi di kalangan sekitar (Emmamadison, 2019).

Sejak Oh Hyuk Jin mengungkap skandal Burning Sun, banyak saksi mata yang mengaku melihat tindakan ilegal seperti narkoba dan prostitusi berlangsung di bawah radar yang mana membuat budaya klub malam di Seoul menjadi kacau balau. Karena masalah ini terus berkembang, Oh Hyuk Jin memutuskan untuk menulis pesan kepada semua orang yang khawatir tentang keterlibatannya dalam

kasus ini. Ia mengunggah foto Noh Seung Il di KakaoTalk bersama pesan panjang yang menjelaskan pendiriannya. Oh Hyuk Jin mengatakan bahwa Noh Seung Il yang merupakan seorang reporter terkenal dari mantan direktur K Sports Foundation membantunya saat ini. Noh Seung Il adalah orang pertama yang melaporkan berita terbaru tentang korupsi Choi Soon Sil, yang telah masuk ke dalam jaringan luas 1% teratas masyarakat Korea. Sejak mulai menyelidiki skandal Burning Sun, Oh Hyuk Jin mengatakan bahwa ia telah menerima banyak pesan dan ancaman. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak bisa berhenti menyelidiki skandal tersebut karena menurutnya lebih kacau dan kotor daripada yang dibayangkan. Orang-orang takut dengan pernyataannya karena mereka percaya bahwa korupsi itu lebih buruk daripada yang diberitakan oleh media. Beberapa jam setelah unggahan Instagramnya menarik perhatian Nate Pann, unggahan itu dihapus tanpa peringatan. Instagram Oh Hyuk Jin dipenuhi dengan komentar yang mendukung dan menyemangatnya (Koreaboo, 2019).

### *3.1.3 Lobbying*

Strategi ketiga yang diterapkan oleh Gerakan #MeToo adalah melobi. Teori NSM menyoroti betapa pentingnya upaya ini untuk menentang kekuasaan politik dan structural yang mendukung ketidakadilan. Dalam Gerakan Sosial #MeToo melobi digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan mendorong legislasi yang lebih tegas terhadap pelaku pelecehan seksual. Melalui serangkaian pertemuan dengan pejabat pemerintah, para aktivis #MeToo berusaha untuk memperbaiki kebijakan yang ada dan memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Melobi ini tidak hanya dilakukan untuk perubahan kebijakan semata akan tetapi juga sebagai bagian dari usaha yang lebih luas untuk mengubah norma

sosial dan struktur kekuasaan patriarki sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teori NSM. Pada bulan Maret 2018, para aktivis #MeToo mengadakan tiga pertemuan yang melibatkan perwakilan dari Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga (MOGEF). Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh kementerian dalam menangani dan mencegah kasus pelecehan seksual. Aktivis menyampaikan bukti, data serta rekomendasi untuk kebijakan baru yang lebih efektif dalam melindungi korban dan menindak pelaku (Koreakr, 2018).

Di bulan yang sama sejumlah aktivis juga berkesempatan untuk bertemu secara informal dengan Wakil Menteri Pendidikan, Park Chun-ran. Pertemuan ini memungkinkan diskusi yang lebih terbuka dan personal tentang bagaimana kementerian pendidikan dapat berperan dalam mengatasi pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Aktivis menyoroti pentingnya pendidikan seks yang komprehensif dan kebijakan anti pelecehan yang ketat di sekolah dan universitas. Selain itu pada Mei 2018 berbagai organisasi perempuan dan aktivis #MeToo juga mengadakan pertemuan di kantor Majelis Nasional. Pertemuan ini difokuskan pada penelaahan rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan oleh anggota parlemen terkait kekerasan seksual. Aktivis mengajukan saran-saran untuk memperbaiki draf RUU tersebut agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan lebih tegas dalam menghukum pelaku. Selain itu mereka juga mencari cara untuk memperbaiki status quo regulasi di Korea Selatan, dengan tujuan membuat lingkungan lebih adil dan aman bagi semua warga negara (Mogef, 2018).

Gerakan #MeToo di Korea Selatan telah mendorong perubahan signifikan dalam undang-undang terkait kekerasan seksual. Setelah pengungkapan kasus

oleh Seo Ji-hyun, lebih dari 100 undang-undang diusulkan dengan beberapa diantaranya berhasil disahkan seperti ‘Undang-Undang MeToo’ yang memperberat hukuman untuk kejahatan kekerasan seksual berbasis kekuasaan. Namun, proses legislatif menghadapi tantangan termasuk kurangnya konsensus sosial dan kompleksitas birokrasi yang melibatkan berbagai kementerian. Meskipun kemajuan telah dicapai, banyak rancangan undang-undang penting masih menunggu pengesahan. Para anggota parlemen terus mendorong percepatan proses ini, menekankan pentingnya semua undang-undang terkait untuk melindungi perempuan di seluruh negeri. Situasi ini mencerminkan kompleksitas dalam mengubah sistem hukum untuk menangani isu kekerasan seksual secara lebih efektif pasca Gerakan #MeToo di Korea Selatan (BBC, 2018).

#### *3.1.4 Networking*

Terakhir, NSM juga menekankan pentingnya jaringan dalam memperkuat gerakan sosial. Dalam konteks Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan jaringan yang dibangun oleh organisasi perempuan, serikat pekerja dan aktivis lintas sektor memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan gerakan ini. Jaringan ini memungkinkan memperluas pertukaran informasi, koordinasi aksi dan memperkuat solidaritas antara berbagai kelompok yang mendukung gerakan tersebut. Konsep jaringan ini relevan dengan NSM di mana solidaritas transnasional dan hubungan antar kelompok menjadi esensial dalam menantang kekuasaan global dan memperjuangkan keadilan sosial. Melalui jaringan ini, Gerakan Sosial #MeToo tidak hanya beroperasi di tingkat lokal akan tetapi juga berhubungan dengan gerakan global yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Gerakan ini tidak dibentuk oleh sekelompok orang tertentu, melainkan melibatkan

berbagai organisasi non-pemerintah (LSM) yang bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. #MeToo di Korea Selatan merupakan hasil dari aksi kolektif individu dengan dukungan dari banyak organisasi lokal. Berbagai kelompok, termasuk gerakan lingkungan, serikat buruh, asosiasi pengacara dan banyak lagi yang memberikan dukungan mereka terhadap gerakan ini. Jaringan dukungan ini terlihat jelas dalam berbagai konferensi pers yang diadakan untuk menyampaikan pesan dan tujuan gerakan kepada publik. Gerakan #MeToo di Korea Selatan mendapatkan momentum melalui dukungan luas dari berbagai organisasi dan kelompok. LSM memainkan peran kunci dalam menyediakan platform dan sumber daya bagi individu untuk berbagi pengalaman mereka dan menuntut perubahan. Organisasi-organisasi ini membantu mengkoordinasikan upaya dan memastikan bahwa suara para korban didengar oleh masyarakat dan pembuat kebijakan. Dengan dukungan dari gerakan lingkungan, serikat buruh dan asosiasi pengacara, Gerakan #MeToo dapat memperluas jangkauan dan pengaruhnya. Konferensi pers yang diadakan oleh jaringan ini bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen bersama dalam mempengaruhi kekerasan seksual. Jaringan luas ini membantu memperkuat Gerakan #MeToo di Korea Selatan, meningkatkan tekanan pada institusi dan pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat guna mengatasi masalah kekerasan seksual (Unwomen, 2020).

Sebuah survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Media Korea Press Foundation mengungkapkan dukungan yang kuat terhadap Gerakan #MeToo di Korea dengan 88,6% responden menyatakan dukungan mereka. Mayoritas responden (77,1%) mendukung keberanian korban yang mengungkapkan

pengalaman kekerasan seksual mereka. Alasan utama dibalik dukungan ini adalah keyakinan bahwa masalah kekerasan seksual di masyarakat perlu diperbaiki, yang mana hal tersebut dikemukakan oleh 61,7% responden. Survei ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden percaya Gerakan #MeToo efektif dalam meningkatkan kesadaran dan sensitivitas terhadap masalah kekerasan seksual. Mayoritas responden menganggap kekerasan seksual, terutama yang terkait dengan relasi kekuasaan sebagai masalah serius di masyarakat. Menariknya, perempuan dan generasi muda (usia 20-an) cenderung memiliki tingkat kesadaran dan dukungan yang lebih tinggi terhadap gerakan ini dibandingkan laki-laki dari kelompok usia lainnya. Hasil survei ini menggambarkan perubahan signifikan dalam persepsi masyarakat Korea terhadap isu kekerasan seksual dan pentingnya gerakan seperti #MeToo dalam mengatasinya (Jun-yong, 2019).

### **3.2 Dampak Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan**

Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan telah menimbulkan berbagai dampak dan reaksi dalam masyarakat, meskipun masih ada berbagai hambatan yang harus diatasi. Berikut merupakan beberapa dampak utama dari Gerakan Sosial #MeToo:

#### **3.2.1 *Meningkatkan Kesadaran Masyarakat***

Salah satu dampak positif terbesar dari gerakan ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Sebelum adanya gerakan ini, topik tersebut sering dianggap tabu dan jarang dibahas secara terbuka. Namun Gerakan Sosial #MeToo ini telah

memberikan keberanian kepada banyak perempuan untuk berbagi pengalaman mereka dan membuat masyarakat lebih peka terhadap masalah ini. Gerakan ini telah mendorong perubahan signifikan dalam cara masyarakat memandang dan menangani isu pelecehan seksual. Sebelumnya banyak perempuan merasa takut atau enggan untuk berbicara tentang pengalaman mereka karena stigma sosial dan ketakutan akan pembalasan. Dengan munculnya gerakan ini perempuan mulai merasa lebih berani dan didukung untuk mengungkapkan apa yang telah mereka alami. Hal ini tidak hanya membantu korban untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, akan tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan masyarakat umum tentang seriusnya masalah pelecehan seksual (Thomas Maresca, 2020).

### *3.2.2 Mobilisasi Opini Publik*

Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan berhasil memobilisasi opini publik melalui penggunaan media sosial dan media massa yang mana memungkinkan isu pelecehan seksual di Korea Selatan ini diangkat ke ruang publik. Sebelumnya, topik ini sering kali dianggap tabu atau disembunyikan karena pengaruh dari kuatnya budaya patriarki yang ada di Korea Selatan. Namun, dengan berkembangnya platform digital, banyak korban mulai berbicara dan menciptakan gelombang kesadaran yang meluas. Diskusi terbuka tentang kekerasan atau pelecehan seksual kemudian menjadi sorotan nasional yang mana mendorong masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam isu ini. (Maresca 2020)

Mobilisasi opini publik ini memberikan tekanan yang signifikan pada pemerintah dan institusi hukum. Pemerintah, yang sebelumnya lamban dalam menanggapi isu pelecehan seksual mulai merasakan desakan dari masyarakat

untuk melakukan perubahan kebijakan yang lebih serius. Banyak pihak termasuk lembaga penegak hukum mulai mengevaluasi dan mengkaji ulang prosedur mereka dalam menangani kasus pelecehan seksual. Tekanan ini tidak hanya berasal dari demonstrasi langsung, tetapi juga dari perubahan persepsi sosial yang diperkuat melalui media sosial dan media massa yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. (Maresca 2020)

### *3.2.3 Dukungan dari Pemerintah dan Tokoh Publik*

Moon Jae-in, Presiden Korea Selatan secara terbuka mendukung Gerakan #MeToo dan menekankan perlunya perubahan budaya yang mendalam untuk mengatasi pelecehan seksual. Dukungan dari pemerintah dan tokoh-tokoh publik lainnya memberikan dorongan moral yang signifikan dan meningkatkan legitimasi gerakan ini sehingga memperkuat dampaknya dalam masyarakat (Thomas Maresca, 2020). Presiden Moon Jae-in menyadari pentingnya Gerakan #MeToo dalam mengungkap masalah pelecehan seksual yang telah lama tersembunyi di masyarakat. Dalam beberapa kesempatan ia menyerukan perubahan budaya yang mendalam untuk memastikan bahwa isu pelecehan seksual tidak lagi diabaikan. Dukungan dari seorang pemimpin negara seperti Moon Jae-in tidak hanya memberikan validasi terhadap perjuangan korban, tetapi juga mendorong perubahan di tingkat kebijakan dan hukum. Selain dukungan dari presiden, banyak tokoh publik lainnya termasuk selebriti, politisi dan aktivis yang juga telah menyatakan dukungan mereka terhadap Gerakan #MeToo. Dukungan ini memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan gerakan ke audiens yang lebih luas dan memberikan dorongan moral bagi para korban untuk berbicara (Karen, 2018). Dampak di masyarakat dengan adanya dukungan dari

pemerintah dan tokoh publik telah membantu meningkatkan legitimasi Gerakan #MeToo di mata masyarakat. Hal tersebut mengirimkan pesan kuat bahwa pelecehan seksual merupakan isu serius yang perlu ditangani. Ini membantu mengubah persepsi publik dan mendorong lebih banyak individu untuk berdiri melawan pelecehan seksual serta mendukung korban. Dengan dukungan yang luas gerakan ini telah menjadi katalisator untuk perubahan sosial yang lebih besar.

#### *3.2.4 Tantangan Hukum dan Sosial*

Meskipun kesadaran masyarakat telah meningkat, perubahan dalam hukum dan kebijakan masih bergerak lambat meskipun ada tekanan dari Gerakan #MeToo. Reformasi hukum yang diharapkan banyak pihak belum sepenuhnya terealisasi. Kendala ini sering kali disebabkan oleh kompleksitas dalam sistem hukum dan resistensi dari berbagai pihak yang masih terjebak dalam pandangan konservatif. Banyak korban yang memberanikan diri untuk berbicara justru menghadapi tuntutan balik, seperti tuduhan pencemaran nama baik. Dalam banyak kasus, pelaku atau pihak yang dituduh melakukan pelecehan seksual mengajukan tuntutan hukum terhadap korban yang membuat korban semakin tertekan dan enggan untuk melanjutkan proses hukum. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih belum sepenuhnya mendukung korban pelecehan seksual dan perlu adanya perubahan signifikan. Selain itu, hukum yang ada seringkali tidak memberikan perlindungan yang memadai. Sebagai contoh, pengadilan di Korea Selatan yang masih mengharuskan korban untuk membuktikan bahwa mereka melawan dengan kekerasan agar klaim mereka dapat diterima sebagai pelecehan seksual. Ini merupakan hambatan besar bagi banyak korban, karena tidak semua bentuk pelecehan melibatkan kekerasan fisik yang jelas. Oleh karena

itu ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui hukum agar lebih responsif terhadap berbagai bentuk pelecehan seksual. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perubahan kebijakan yang komprehensif dan dukungan tegas dari sektor publik serta masyarakat luas. Ini termasuk penyusunan undang-undang yang lebih tegas, penyediaan dukungan yang lebih baik untuk korban dan kampanye edukasi yang berkelanjutan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang pelecehan seksual. Hanya dengan langkah-langkah ini, perubahan yang diinginkan dapat terwujud dan korban pelecehan seksual dapat memperoleh keadilan yang layak untuk mereka dapatkan (Thomas Maresca, 2020).

### 3.2.5 *Reaksi Balik Terhadap Feminis*

Reaksi balik terhadap feminisme dalam konteks Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan, tetapi juga memicu reaksi negatif yang signifikan dari sebagian masyarakat yang merasa terganggu dengan perubahan ini. Banyak perempuan yang berani bersuara atau bercerita tentang pelecehan seksual yang mereka alami menjadi target serangan siber dan ancaman lainnya menunjukkan adanya resistensi yang kuat terhadap gerakan feminis. Situasi ini mengindikasikan bahwa meskipun Gerakan Sosial #MeToo telah berhasil meningkatkan kesadaran publik dan mempromosikan kesetaraan gender, masih ada perjalanan panjang yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Tantangan-tantangan yang dihadapi termasuk penolakan dari sebagian masyarakat mencerminkan bahwa perubahan sosial yang diupayakan oleh feminisme dan Gerakan #MeToo memerlukan upaya lebih lanjut dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada di masyarakat. Upaya ini melibatkan pendidikan, perubahan kebijakan dan dukungan yang lebih besar

terhadap mereka yang berani berbicara atau bercerita untuk memastikan bahwa gerakan ini tidak hanya bertahan namun juga berkembang ketika menghadapi perlawanan (Thomas Maresca, 2020).

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengubah cara masyarakat memahami dan menangani masalah pelecehan seksual, meskipun gerakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang masih harus dihadapi. Kampanye ini telah memberikan keberanian kepada banyak perempuan untuk mengungkapkan pengalaman pribadi mereka terkait pelecehan seksual, dengan dukungan yang lebih besar dari masyarakat yang membuat mereka merasa takut atau malu untuk berbicara, kini merasa didukung oleh komunitas yang lebih luas, sehingga mereka lebih berani untuk mengungkapkan kebenaran.

Dukungan luas dari masyarakat memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan dari Gerakan Sosial #MeToo, sekaligus memberikan dorongan moral yang signifikan bagi para penyintas untuk berani berbicara dan menuntut keadilan. Masyarakat yang lebih sadar dan mendukung gerakan ini menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi para korban untuk tampil ke depan dan berbagi pengalaman mereka tanpa takut akan stigma dan diskriminasi. Namun gerakan ini juga menghadapi hambatan yang cukup serius. Banyak penyintas yang telah berani bersuara justru menghadapi tuntutan balik, seperti tuduhan pencemaran nama baik, yang menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada masih sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi para korban. Selain itu, perempuan yang berani berbicara seringkali menjadi target

serangan siber dan ancaman, yang mana mengindikasikan adanya resistensi yang kuat terhadap gerakan feminis dan perubahan sosial yang diusung oleh Gerakan Sosial #MeToo.

Meskipun Gerakan Sosial #MeToo telah berhasil meningkatkan kesadaran publik mengenai isu pelecehan dan mendorong kemajuan menuju kesetaraan gender, kenyataan ini menunjukkan bahwa masih ada perjalanan panjang yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan utama gerakan ini secara penuh di Korea Selatan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan menjamin bahwa reformasi yang di maksud benar-benar dilaksanakan di semua tingkat masyarakat, maka diperlukan upaya berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti bahwa Gerakan Sosial #MeToo di Korea Selatan berhasil mendorong perubahan budaya dan membuka dialog yang lebih luas tentang hak-hak perempuan dan pelecehan seksual. Dengan mengacu pada teori *New Social Movements* dari Edelman, dapat disimpulkan bahwa gerakan ini adalah contoh nyata bagaimana identitas dan simbolisme menjadi kekuatan utama dalam dinamika gerakan sosial kontemporer.

## **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan analisis dan kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya perlu mengkaji secara mendalam mengenai lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum di Korea Selatan dalam menangani kasus pelecehan seksual yang terungkap melalui Gerakan Sosial #MeToo. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada kendala-kendala yang dihadapi para korban dalam mendapatkan keadilan, mengevaluasi kelemahan dalam sistem

hukum yang ada serta memberikan saran untuk meningkatkan prosedur dan kebijakan penegakan hukum yang lebih memenuhi kebutuhan korban pelecehan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amsden, L. (2018). *The #Metoo Movement in Korea*. PSU Vanguard.
- Arungbudoyo, W. (2018). *Cegah Pelecehan Seksual, Pemerintah Korsel Janji Terbitkan Aturan Baru*. Okezone.
- BBC. (2018a). *Feminisme: 3 Perubahan yang Terjadi dalam Masyarakat Korea melalui “Gerakan Me Too” pada Tahun 2018*. BBC.
- BBC. (2018b). *Jo Min-ki: South Korean actor found dead after #MeToo allegations*. BBC.
- BBC. (2019). *Pelecehan seksual di ruang publik: Mayoritas korban berhijab, bercelana panjang dan terjadi di siang bolong*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49014401>
- BBC. (2020). *Pengadilan Korea Selatan Hukum Pimpinan Jaringan Pelecehan Seks Online Terbesar, Bagaimana Modusnya?* BBC.
- BBC. (2024). *Burning Sun: Exposing the Secret K-pop Chat Groups*. BBC.
- Bicker. (2018a). *#MeToo movement takes hold in South Korea*. *bbc.com*. Bintang terkenal Korea, Jo Min-ki, bunuh diri setelah jadi sasaran kampanye #MeToo. BBC.
- Bicker, L. (2018b). *#MeToo movement takes hold in South Korea*. In *BBC News* (pp. 1–12). <https://www.bbc.com/news/world-asia-43534074>
- Brito, I. (2020). *Sexual Violence in South Korea: Preventative Measures are Desperately Needed*. The International Affairs Review.
- Edelman, Marc. “*Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics*.” *jstor*, 2001.
- Emmamadison. (2019). *Reporter who first broke “Burning Sun” scandal appears to have gone missing + netizens fear for his safety*. Allkpop.
- Gurvinder Gill, I. R.-J. (2020). *Me Too founder Tarana Burke: Movement is not over*. BBC.
- Hanyang, D. (2023). *Sexual Harassment In South Korea*. Lyceum.
- Herald, K. (2017). *What Moon Jae-in Pledged to do as President*. The Korea Herald.
- Inhwa Jeong, K. I. (2021). *Nth Room Crimes and Intensifying Gender Conflict in South Korea: Attempting to Unite a Highly Divided Society*. International Institute of Social Studies.
- Israpil, I. (2017). *Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)*. *Pusaka*, 5(2), 141–150. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>
- Jang, B. (2022). *Yoon Suk-yeol Needs to Change the Way South Korea Treats Women*. Amnesty International.
- Ji-hye, S. (2021). *Migrant Workers Report More Claims of Sexual Assault on Farms*. The Korea Herald.
- JTBC. (2018). *[Wawancara] Jaksa Seo Ji-hyeon, “Ada pelecehan seksual dalam penuntutan, tapi ditutupi secara rahasia*. JTBC.
- Ju-a, L. (2020). *Nth Room Case: Not an Evil Crime*. Soongdil Times.
- Jun-yong. (2019). *89% Masyarakat Mendukung Gerakan #MeToo*. Hani.
- Kardina, & Yurisa, A. M. (2021). *Analisis Gender Based Violence dalam*

- Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan. *Ilmu Hubungan Internasional*, 1(2), 156–170.
- Karen. (2018). *#MeToo Movement in South Korea: Dismantling the Male Power Structure*. Seoulbeats.
- KBS. (2020a). *Majelis Nasional Korsel Revisi UU Terkait Kejahatan Seksual, Hukuman Diperkuat*. KBS World Indonesian.
- KBS. (2020b). *Pemerintah Korsel Tetapkan Kebijakan untuk Berantas Aksi Kejahatan Seksual Digital*. KBS World Indonesian.
- KBS. (2022). *(Presiden Moon : Kondisi Kesetaraan Gender di Korsel Lemah Dibandingkan Perkembangan Negara*. KBS World Indonesian.
- Kim, V. (2019). *Empowered by #MeToo, a new generation fights sexual abuse in South Korea's schools*. Los Angeles Times.
- Koreaboo. (2019). *No TitleNetizens Fear For Burning Sun Reporter's Life After His Long Message On Instagram*. Koreaboo.
- Koreakr. (2018). *"Pertemuan Kedua untuk Empati dan Komunikasi Mengenai Gerakan MeToo."* Koreakr.
- Kristen. (2023). *Sexual Violence in Korea: Understanding the Legal Landscape for Foreigners*. Lee&Lee.
- Maharani, A. (2022). *MENINJAU KEBERHASILAN MOON JAE-IN SEBAGAI PRESIDEN KOREA SELATAN*. Research Gate.
- Midha, A., Kaur, S., & S, N. (2018). Confucianism and Changing Gender Roles. *International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology*, 4(1), 347–353. <https://www.ijariit.com/manuscripts/v4i1/V4I1-1270.pdf>
- Mogef. (2018). *Five ME-Too Revision Bills, including on the Criminal Act, Approved in Cabinet Meeting*. Mogef.
- Moon, K. H. S. (2022). *South Korea's Misogyny Problem*. East Asia Forum.
- Penda, M. (2023). *The Concept of Rape in South Korea*. Gender in Geopolitics Institute.
- Reditya, T. H. (2021). *Profil Pemimpin Dunia: Moon Jae In, Presiden Korea Selatan*. Kompas.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sang-Hun, C. (2019). *Ex-Presidential Candidate in South Korea Is Jailed for Sexual Assault*. The New York Times.
- Schieber, O. (2020). *South Korea Needs to Contend With Sexual Violence*. Foreign Policy.
- Se Eun Gong, M. S. (2018). *South Korean Women Fight Back Against Spy Cams In Public Bathrooms*. Npr.
- So, W. (2023). *Gender gap index in South Korea from 2016 to 2023*. Statista.
- Soo-hyun, K. (2018). *Harassment Stories Mushroom*.
- Souza, N. De. (2020). *The Nth Room Case and Modern Slavery in the Digital Space*. Lowy Institute.
- Suastha, R. D. (2018). *Dituduh Memperkosa, Gubernur Eks Capres Korsel Mundur*. CNN.
- Thomas Maresca. (2020). *Two Years Into #MeToo in South Korea, Change is Slow to Come*. UPI.
- Unwomen. (2020). *#MeToo: Headlines from a Global Movement*. United Nations

Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.

Widya, A. (2021). *Mengenal Apa Itu Gender Gap yang Kerap Dibicarakan Menkeu Sri Mulyani*. Parapuan.

Yang, H. (2018). *South Korea's ruling party reels from more sex abuse allegations, vows "zero tolerance."* Reuters.

Yoon, L. (2023). *Rate of sexual assaults in South Korea from 2008 to 2021*. Statista.

You-bin, C. (2020). *Nth Room Case: How Many Years for "Digital Sex Crime" in Korea? [VIDEO]*. The Korea Times.

Young-hee, L. (2017). *Revisi Pelecehan Seksual dan Undang-Undang Terkait Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dan Tindakan Pemberantasan Penanggulangan*.

Yun-jeong. (2018). *Gerakan "#MeToo" menjadi topik terpenting masyarakat Korea pada tahun 2018*. Womennews.

Yuri. (2021). *Kasus Pelecehan Seksual pada Pekerja Imigran di Korea*.